

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Keterbukaan informasi dan transparansi publik menjadi hal yang krusial saat ini di Indonesia. Perkembangan sistem teknologi informasi yang semakin pesat menjadikan tuntutan masyarakat terlihat jelas dengan semakin kritisnya dalam menanggapi berbagai informasi yang masuk dan usaha-usaha untuk mendapatkan informasi yang transparan. Hal demikian tentu menjadi tantangan bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) untuk kesejahteraan nasional. Pemerintah berupaya menyelaraskan layanan publik dengan kemajuan teknologi dalam bentuk penerapan layanan elektronik (*e-Government*).

Dalam bidang keuangan negara, *e-Government* diwujudkan dalam bentuk *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS). Implementasi IFMIS bertujuan antara lain untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul akibat dari penggunaan sistem manual atau sistem yang terpisah-pisah dalam pengelolaan anggaran dan proses akuntansinya. Sebagaimana menurut Hashim (2014: 7) menyatakan bahwa:

*“Work on IFMIS projects is often initiated after problems are faced by Government in the area of budget management. Typical problems are: Increasing fiscal deficits and lack of any means of exercising fiscal control, Lack of in-house capacity to determine the fiscal position, and reliance on the books of the Central Bank for this information, resulting in an inability to perform the cash management function effectively, Weaknesses in the transaction processing capacities of systems used by operational agencies*

*such as the Treasury, Tax Administration or line agencies, which result in lack of timely information in a form that facilitates effective expenditure control, revenue management, and management of agency programs and projects”.*

Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang R.I. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang memiliki tugas salah satunya yaitu menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya. Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari disiplin ilmu akuntansi, sehingga dalam penyusunan laporan keuangan dibutuhkan orang yang kompeten dalam bidang akuntansi. Kompetensi sumber daya manusia merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut Rahadi, dkk., (2021: 20), menyatakan bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan kelompok dan individu yang relevan secara organisasi (termasuk pekerja tidak tetap, pemasok, dan siapapun yang memberikan kemampuan apapun bagi organisasi), maka kompetensi menjadi aspek penunjang dalam menentukan keberhasilan organisasi perusahaan. Karenanya, SDM yang kompeten sebagai penentu terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Serangkaian kompetensi dibutuhkan untuk pelaporan keuangan, memahami sistem akuntansi, dan memahami secara komprehensif sistem pengendalian internal yang bebas dari salah saji material.

Pemerintah berkewajiban untuk menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sesuai dengan prinsip-prinsip dari Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu tersedianya suatu sistem informasi yang andal.

Pemanfaatan sistem informasi akuntansi sangat penting untuk diterapkan guna menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Rahmawati dan Sumarno (2020: 115), menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi yang menyediakan informasi memiliki beberapa fungsi dalam keberlangsungan usaha yakni mengumpulkan semua data kegiatan bisnis perusahaan dan menyimpan data tersebut secara efektif dan efisien, mengambil data yang dibutuhkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan aktivitas bisnis, membuat dan mencatat data transaksi dengan benar sesuai dengan urutan dan tanggal terjadinya transaksi ke dalam jurnal-jurnal yang diperlukan pada proses akuntansi, mengubah sekumpulan data menjadi sebuah informasi keuangan yang dibutuhkan perusahaan, dan sebagai suatu sistem pengendali keuangan agar tidak terjadi suatu kecurangan.

Pemanfaatan Teknologi Informasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaporan keuangan. Dengan adanya sistem yang mempergunakan teknologi informasi, pekerjaan penyusunan laporan keuangan akan lebih mudah dan rapi (Rahmawati dan Sumarno, 2020: 81-82). Dalam dunia modern saat ini, penggunaan teknologi informasi menjadi suatu keharusan. Teknologi informasi dapat membantu di antaranya dalam mengelola laporan keuangan, meskipun laporan keuangan adalah produk yang dihasilkan oleh sumber daya manusia di bidang akuntansi, tetapi pemanfaatan teknologi dapat meminimalisir kesalahan dari manusia itu sendiri.

Sebagai suatu upaya untuk memenuhi tuntutan tersebut di atas dan guna tercapainya *e-Government*, pada akhir tahun 2015 pemerintah Indonesia telah berhasil mengembangkan suatu sistem aplikasi terintegrasi yang diterapkan untuk satuan kerja instansi pemerintah pusat pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberi nama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang penerapannya dilakukan secara bertahap, didukung dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 223/PMK.05/2015 dan Nomor 131/PMK.05/2016 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang merupakan serangkaian kegiatan untuk menerapkan/mengoperasikan SAKTI dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI pada unit-unit yang ditunjuk/terbatas untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh.

SAKTI merupakan sebuah aplikasi sebagai bagian dari IFMIS yang digunakan secara *mandatory* oleh instansi/satuan kerja (satker) pengelola dana yang bersumber dari APBN. Dalam menyajikan informasi laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pembangunan sistem ini mendukung prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, akuntabel, terintegrasi dan berbasis kinerja. Fitur utama SAKTI antara lain integrasi basis data, *single entry point*, menerapkan akuntansi berbasis akrual, dan jaminan keamanan data.

Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung R.I. dan sebagai satker pengguna sistem SAKTI sejak Januari 2022, yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LSAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Ada 9 (sembilan) sistem aplikasi teknologi informasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebelum adanya SAKTI yang digunakan satker pengelolaan keuangan negara yang telah berjalan sejak tahun 2005 yakni Sistem Aplikasi Satker (SAS), Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Persediaan, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (RKA K/L-DIPA), Sistem Laporan Bendahara Instansi (SiLaBI), Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA), Elektronik Rekonsiliasi dan Laporan Keuangan (e-Rekon), Personal Identification Number Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PIN PPSPM), dan Perencanaan Kas (Renkas).

Sedangkan ada 3 (tiga) subsistem pada Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terintegrasi yang ada di Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat yakni SIMAK-BMN, SAS, dan SAIBA yang menjadi media untuk menggabung semua laporan dari aplikasi laporan keuangan lainnya, dengan cara mengambil ADK (Arsip Data Komputer) selain 3 (tiga) aplikasi terintegrasi tersebut di atas, laporan keuangan dalam SAIBA pun disusun secara manual dengan cara konfirmasi secara langsung ke petugas atau operator keuangan lainnya yang terkait dengan laporan keuangan

seperti Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan, di mana 2 aplikasi tersebut tidak terintegrasi dengan SAIBA.

Data realisasi dapat diambil dari aplikasi *online* OM-SPAN yang kemudian disalin ke aplikasi SAS yang merupakan data realisasi atas pengajuan tagihan dalam aplikasi SAS, data yang diambil adalah data yang dipilih sesuai periode yang diperlukan, selanjutnya disalin kembali ke dalam aplikasi SAIBA, yang harus mempunyai PAGU berbentuk ADK yang anggaran tersebut dikeluarkan dari aplikasi SAS. Selanjutnya aplikasi terhubung dengan aplikasi SIMAK-BMN, data yang diambil yaitu data persediaan lebih dahulu sebelum akhirnya setelah diolah dari aplikasi SIMAK-BMN juga akan mengirimkan datanya berupa ADK kepada aplikasi SAIBA. Aplikasi persediaan ini digunakan untuk mencatat barang habis pakai untuk kegiatan operasional instansi.

Sedangkan aplikasi SIMAK-BMN hanya digunakan untuk menghitung aset tetap dari belanja modal pada instansi, sehingga aplikasi SAIBA merupakan media terakhir dari semua aplikasi yang akan menyusun laporan keuangan instansi dan hasil akhir dari penyusunan laporan keuangan. Untuk laporan yang disusun di setiap bulannya yang akan dilaporkan ke Kementerian Keuangan melalui aplikasi *online* e-Rekon & LK, merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka penyusunan rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Banyaknya aplikasi tersebut di atas yang penggunaannya terpisah tentu berisiko tinggi yang membuat sebagian besar satker merasa terbebani karena harus memahami semua aplikasi yang saling keterkaitan, melihat tidak semua satker

mempunyai sumber daya yang memadai. Operator aplikasi dituntut tepat dalam memilih menu transaksi, karena setiap menu transaksi akan menghasilkan jurnal yang berbeda, sehingga kesalahan dalam memilih menu transaksi akan mengakibatkan kesalahan dalam penyajian laporan keuangan.

Berdasarkan Lampiran I Surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor 1576/SEK/KU.00/7/2021 tentang Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan LKMA Semester I TA 2021 poin 6 (enam) dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. Semester II TA 2021 dan Kegiatan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021, terdapat temuan yang menyebabkan perlu adanya penyelesaian terhadap faktor yang menjadi penyebab temuan tersebut, di antaranya perlu ada peningkatan kompetensi dan penyiapan kaderisasi/regenerasi SDM yang memadai di bidang pengelolaan keuangan negara dan akuntansi pelaporan serta perlunya memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang canggih agar proses pengendalian dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan mudah.

Adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI menjadi landasan bagi seluruh satker yang terlibat dalam pengelolaan keuangan APBN untuk beralih ke aplikasi sistem tersebut, yang diharapkan menjadi solusi permasalahan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Karena terdapat perbedaan antara SAKTI dengan aplikasi satker sebelumnya yaitu menggunakan satu *database* terpusat, memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi dengan adanya proses enkripsi/dekripsi ADK yang dapat diunduh di beberapa *operating system* (misal: *windows, linux*) yang lebih mudah digunakan

(*user friendly*), dapat dijalankan dalam spesifikasi PC/laptop yang minimum, serta kinerja aplikasi yang lebih konsisten.

Setiap penerapan atas kebijakan baru tentu memiliki implikasi dan tantangan yang dihadapi terutama oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 171/PMK.05/2021 Pasal 1 ayat (1)). Fenomena sampai saat ini yang dihadapi oleh user SAKTI pada Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat masih mengalami beberapa kendala yakni kurangnya pemahaman sumber daya atau user dalam menggunakan aplikasi serta sering adanya pembaruan aplikasi SAKTI, sehingga berdampak pada kualitas laporan keuangan yang akan disajikan.

Hal tersebut selaras dengan hasil laporan DJPb, Kementerian Keuangan R.I., pada tanggal 17 Maret 2022 tentang analisis kendala implementasi SAKTI pada satker lingkup KPPN Meulaboh yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang akan disajikan. Faktor penyebab kendala tersebut di antaranya pelaksanaan *training* yang kurang optimal, lokasi satker *remote area*, SDM satker yang terbatas, jaringan internet yang kurang stabil dan rentang kendali organisasi satker. Sedangkan dengan adanya aplikasi SAKTI, user dituntut lebih detail dalam menginput data dan tidak menunda pekerjaan serta dapat bersinergi dengan pengguna lainnya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)**

## **Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Di Wilayah Jawa Barat)”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman user dalam menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
2. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) masih terus mengalami pembaruan (*update*).

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat?
2. Seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat?
3. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat?

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat penulis dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu di Universitas Sangga Buana Bandung.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) terhadap kualitas laporan keuangan pada Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Penelitian pada dasarnya dilakukan dengan tujuan ingin menyumbangkan hasilnya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, meningkatkan efektivitas kerja atau

mengembangkan sesuatu serta untuk merespon positif terhadap idealisme yang ada kaitannya dengan fenomena di lapangan. Hasil penelitian ini, berguna untuk menambah referensi penelitian terutama di bidang sistem pelaporan keuangan pemerintah dan juga sebagai landasan dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

#### **a. Kegunaan Bagi Penulis**

Hasil penelitian ini menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk menambah wawasan keilmuan terutama dalam pengelolaan keuangan negara dan juga sebagai landasan dalam menyusun karya ilmiah selanjutnya.

#### **b. Kegunaan Bagi Pengguna SAKTI**

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk pengembangan Aplikasi SAKTI selanjutnya agar implementasi SAKTI dan manajemen kualitas pengguna di semua kementerian/lembaga berjalan sukses.

#### **c. Kegunaan Bagi Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi instansi dalam pengambilan keputusan terutama pada kebijakan yang berkaitan dengan kompetensi sumber daya manusia dalam penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

#### **d. Kegunaan Bagi Akademisi**

Hasil penelitian ini dapat dapat dijadikan sebagai literatur dalam melaksanakan penelitian selanjutnya dan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

## **1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis**

### **1.6.1 Landasan Teori**

Ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana perubahan dari PP Nomor 24 Tahun 2005, maka basis SAP berubah dari kas menjadi akrual. SAP berbasis akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan (KSAP, 2021: 10).

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Jika tidak memenuhi prasyarat normatif tersebut, maka dapat mengakibatkan kerugian negara. Oleh karena itu, selain diperlukan sumber daya manusia yang kompeten, agar dalam penyampaian informasi laporan

keuangan pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, perlu dilaksanakannya sistem akuntansi pemerintah pusat (Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara).

Kompetensi digambarkan sebagai gabungan keterampilan, pengetahuan dan atribut untuk menghasilkan pekerjaan/tugas dengan standar yang ditetapkan. Kompetensi merupakan seperangkat karakteristik dan keterampilan yang dapat dibuktikan yang memungkinkan, dan meningkatkan efisiensi, kinerja pekerjaan. Tujuan departemen sumber daya manusia adalah untuk menemukan karakteristik karyawan yang memungkinkan mereka untuk melakukan tugas mereka dengan sukses dan dengan cara yang luar biasa, serta untuk menentukan aturan fungsi SDM dengan pertimbangan khusus yang diberikan pada kompetensi seorang karyawan (Rahadi, dkk., 2021: 6).

Kementerian Keuangan R.I., melalui Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP), mengembangkan suatu sistem aplikasi yang terintegrasi guna mendukung proses pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Sistem tersebut adalah SAKTI, dengan mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satker yang dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pelaporan keuangan. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 223/PMK.05/2015, SAKTI mulai diimplementasikan pada tahun 2015 untuk satker di lingkup DJPb, Kementerian Keuangan sebagai *pilot project* yang menggunakan sistem *single entry point*, *single database*, dan akuntansi berbasis akrual.

## 1.6.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil dari penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini disajikan pada tabel 1.1, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Judul Peneliti Sebelumnya	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Skripsi	
				Persamaan	Perbedaan
1.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Nurillah, 2014)	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Intern.  Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern memiliki Pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah	Variabel: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Sumber Data: Primer	Varabel: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD); Pemanfaatan Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Intern  Unit Analisis: SKPD Kota Depok  Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i>
2.	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan, Pengendalian Intern, Teknologi Informasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas	Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Pengendalian Intern; Teknologi Informasi; Komitmen Organisasi;	Kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, pengendalian intern, teknologi informasi dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap	Variabel: Kompetensi Sumber Daya Manusia; Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Sumber Data: Primer	Variabel: Pengendalian Intern; Teknologi Informasi; Komitmen Organisasi  Unit Analisis: Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat

No.	Judul Peneliti Sebelumnya	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Skripsi	
				Persamaan	Perbedaan
	Laporan Keuangan Pada Satker Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri (Ramadan, 2015)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Kualitas laporan keuangan		Jenderal Cipta Karya Provinsi Kepri Teknik Sampling: <i>Probability Sampling</i>
3.	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pengadilan Agama Batam. (Ningrum, 2018)	Variabel Independen: kualitas sumber daya manusia; pemanfaatan teknologi informasi; penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.  Variabel Dependen: kualitas laporan keuangan Pengadilan Agama Batam	Kualitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan Pengadilan Agama Batam.  Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pengadilan Agama Batam.	Variabel: Kualitas sumber daya manusia; pemanfaatan teknologi informasi  Sumber Data: Primer	Variabel: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual  Unit Analisis: Pengadilan Agama Batam  Teknik Sampling: <i>Saturated Sampling</i>
4.	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal;	Sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi	Variabel: Kapasitas Sumber Daya Manusia; Kualitas	Sistem Pengendalian Internal; Pemanfaatan

No.	Judul Peneliti Sebelumnya	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Skripsi	
				Persamaan	Perbedaan
	Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Romanti, 2018)	Pemanfaatan Teknologi Informasi; Kapasitas Sumber Daya Manusia. Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah  Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	informasi, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan	Laporan Keuangan Pemerintah  Sumber Data: Primer Teknik Sampling: <i>Non-Probability Sampling</i> atau Sampling Jenuh	Teknologi Informasi.  Unit Analisis: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung
5.	Peranan Sistem Pengendalian Internal dan Penggunaan Teknologi Kualitas Laporan Keuangan SKPD Kota Surakarta (Mulyadi dan Haryoso, 2019)	Variabel Independen: Sistem Pengendalian Internal; Penggunaan Teknologi Informasi  Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Surakarta, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD Kota Surakarta.	Variabel: Penggunaan Teknologi Informasi; Kualitas Laporan Keuangan  Sumber Data: Primer	Sistem Pengendalian Internal;  Unit Analisis: SKPD Kota Surakarta  Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i>
6.	Analisis Pengaruh Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan	Variabel Independen: Implementasi Sistem Aplikasi	Implementasi SAKTI dan pengendalian internal berpengaruh	Variabel: Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan	Pengendalian Internal.  Unit Analisis: Lingkup

No.	Judul Peneliti Sebelumnya	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Skripsi	
				Persamaan	Perbedaan
	Tingkat Instansi (SAKTI), Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Satker Lingkup Ditjen Perbendaharaan Wilayah Pulau Jawa, Kementerian Keuangan) (Setiawan, 2020)	Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); Kompetensi Sumber Daya Manusia; Pengendalian Internal  Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.	Tingkat Instansi (SAKTI); Kompetensi Sumber Daya Manusia Sumber Data: Primer  Teknik Sampling: Sampling Jenuh	Ditjen Perbendaharaan Wilayah Pulau Jawa, Kementerian Keuangan
7.	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Henny, dkk., 2021)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Instansi  Variabel Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Instansi, dan Sistem Pengendalian Internal	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Instansi, Kualitas Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan	Variabel: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Instansi  Sumber Data: Primer	Pengendalian Internal  Unit Analisis: Satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  Teknik Sampling: <i>Purposive Sampling</i>

Sumber: diakses di internet pada Desember 2022

### 1.6.3 Kerangka Konseptual

Definisi kerangka konseptual adalah kerangka fikir mengenai hubungan antar variabel-variabel yang terlibat dalam penelitian atau hubungan antar konsep dengan konsep lainnya dari masalah yang diteliti sesuai dengan apa yang telah diuraikan pada studi kepustakaan (Sampurna dan Nindhia, 2018: 8).

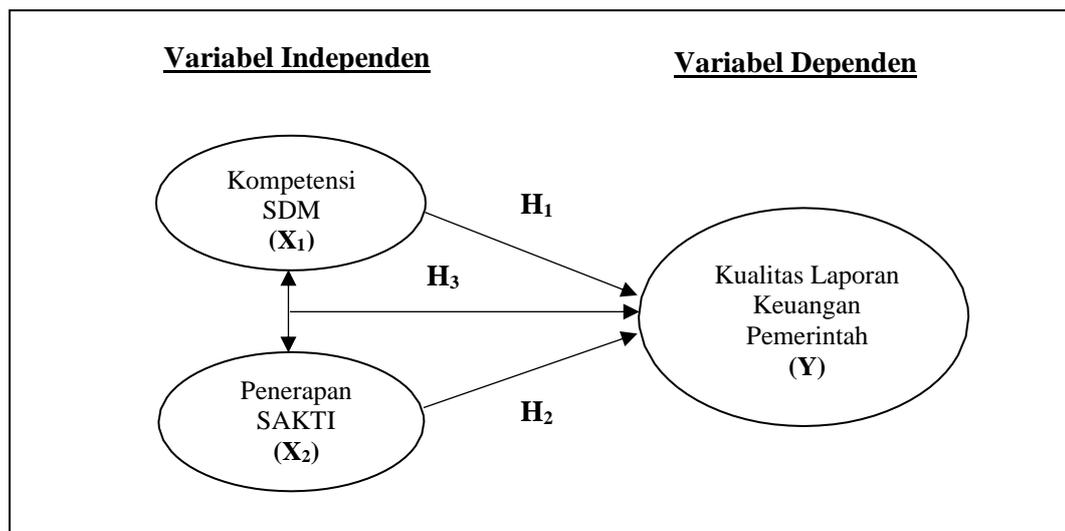
Kebijakan penggunaan akuntansi basis akrual di Indonesia dituangkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Regulasi tersebut mengamankan penggunaan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan pemerintah selambat-lambatnya diimplementasikan pada tahun 2015. Laporan keuangan dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK memberi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun 2012 sampai dengan 2021 terhadap laporan keuangan Mahkamah Agung R.I., meskipun opini WTP berhasil diraih, BPK memberikan rekomendasi terhadap beberapa temuan yang wajib diperbaiki antara lain integrasi sistem informasi penyusunan laporan keuangan, meningkatkan pengendalian dalam sistem informasi penyusunan laporan keuangan, dan meningkatkan kapasitas SDM serta pengendalian internal dalam proses pengelolaan dan pelaporan keuangan (Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2021, BPK R.I.).

Dalam penelitian ini, sistem informasi yang diteliti adalah aplikasi SAKTI. Maka variabel independen penelitian adalah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan variabel dependennya adalah kualitas laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel independen yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Berdasarkan uraian dan hubungan antar variabel di atas, penulis membuat kerangka konseptual sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Konseptual Teoritis**

#### 1.6.4 Hipotesis

Definisi hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan teori yang relevan, belum didasarkan atas fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoretis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban empiris, karena jawaban empiris baru akan dilakukan pada saat penelitian dilakukan (Sinambela dan Sinambela, 2022: 15).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai andil yang besar dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh positif terhadap laporan keuangan. (Nurillah, 2014; Ramadan, 2015; Romanti, 2018; Henny, dkk., 2021). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Ningrum (2018) dan Setiawan (2020), bahwa kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh negatif dan tidak berpengaruh terhadap laporan keuangan.

Selaras dengan kompetensi sumber daya manusia yang mempunyai andil besar dalam terciptanya laporan keuangan yang berkualitas, bahwa dengan adanya sistem informasi keuangan yang berkualitas, maka karakteristik kualitatif laporan keuangan akan dapat terpenuhi. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi teknologi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Nurillah, 2014; Ramadan, 2015; Romanti, 2018; Setiawan, 2020; Henny, dkk., 2021). Berbanding terbalik dengan hasil penelitian Ningrum (2018) dan Mulyadi dan Haryoso (2019), bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Adapun Hipotesis yang dikembangkan penulis dalam penelitian ini, yaitu “Kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat)”.

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini, lokasi penelitian dilaksanakan di 23 (dua puluh tiga) satuan kerja Pengadilan Negeri di wilayah Jawa Barat, yang mana pengumpulan data menggunakan kuesioner dalam format *google form* yang dikirim melalui aplikasi *whatsapp*. Sedangkan, untuk waktu penelitian dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan 8 Maret 2023.